

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Surabaya Rungkut)

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh :

TRI BANGGA NIRMALA

0813010063/FE/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2012

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Surabaya Rungkut)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

TRI BANGGA NIRMALA

0813010063/FE/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2012

USULAN PENELITIAN  
PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Surabaya Rungkut)

yang diajukan

TRI BANGGA NIRMALA  
0813010063/FE/AK

telah disetujui untuk diseminarkan oleh

Pembimbing Utama

Dr. Sri Trisnaningsih, SE. MSi  
NIP. 196509291992032001

Tanggal :.....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Sri Trisnaningsih, SE. MSi  
NIP. 196509291992032001

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

KPP Pratama Surabaya Rungkut)

yang diajukan

TRI BANGGA NIRMALA

0813010063/FE/AK

Disetujui untuk Ujian Lisan oleh

Pembimbing Utama

Dr. Sri Trisnaningsih, SE. MSi  
NIP. 196509291992032001

Tanggal :.....

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi

DRS.EC.RA. SUWAIDI, MS  
NIP. 196003301986031003

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

KPP Pratama Surabaya Rungkut

Disusun Oleh :

Tri Bangga Nirmala

0813010063/FE/AK

telah dipertahankan dihadapan

dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

pada tanggal 05 Oktober 2012

Pembimbing Utama :

Tim Penguji :

Ketua

Dr. Sri Trisnaningsih,SE.MSi

Dr. Sri Trisnaningsih,SE.MSi

Sekretaris

Drs.Ec.Tamadoy T,MM

Anggota

Drs.Ec.R.Sjarief H,MSi

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM

NIP. 19630924 198903 1001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jurusan Akuntansi.

Keberhasilan penulis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi pengarahan dan bimbingan yang membangun untuk penelitian.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah berjasa mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak Bramantyo, selaku bagian Kemahasiswaan Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Rungkut yang telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Bapak Habib, selaku Kepala Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Mami Papiku tercinta, Mama, Uti, dan Kakak-kakakku, Sahabat-sahabatku dan semua temanku terimakasih atas kasih sayang, doa, motivasi, nasehat, dan jerih payah yang telah kalian berikan atas terselesaikannya penelitian ini.

Akhir kata penulis mengharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak terdapat kekurangan dan penulis berharap kritik dan sarannya.

Surabaya, September 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Landasan Teori .....	14
2.2.1. Pajak .....	14
2.2.1.1. Pengertian .....	14
2.2.1.2. Fungsi Pajak .....	17
2.2.1.3. Sistem Pungutan Pajak .....	18
2.2.1.4. Pengelompokan Pajak .....	20
2.2.1.5. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak .....	22



2.2.1.6.	Hambatan Pemungutan Pajak .....	23
2.2.2.	Pajak Penghasilan (PPh) .....	24
2.2.2.1.	Pengertian .....	24
2.2.2.2.	Subyek Pajak .....	24
2.2.2.3.	Obyek Pajak .....	26
2.2.2.4.	Tarif Pajak .....	27
2.2.3.	Kesadaran Perpajakan WP .....	28
2.2.4.	Kejujuran Wajib Pajak .....	29
2.2.5.	Hasrat Membayar Pajak .....	30
2.2.6.	Kedisiplinan WP .....	30
2.2.7.	Penghindaran Pajak .....	32
2.2.8.	Pengaruh Kesadaran WP dengan Penghindaran Pajak .....	34
2.2.9.	Pengaruh Kejujuran WP dengan Penghindaran Pajak .....	36
2.2.10.	Pengaruh Hasrat Membayar Pajak dengan Penghindaran Pajak .....	38
2.2.11.	Pengaruh kedisiplinan WP dengan Penghindaran Pajak .....	40
2.3.	Kerangka Pikir .....	42
2.4.	Hipotesis .....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	44
3.1.1.	Definisi Operasional Variabel .....	44

3.1.2. Teknik Pengukuran Variabel .....	45
3.2. Teknik Pengambilan Sampel .....	48
3.2.1. Obyek Penelitian .....	48
3.2.2. Populasi .....	48
3.2.3. Sampel .....	49
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	51
3.5. Uji Asumsi Klasik .....	52
3.5.1. Regresi Linear Berganda .....	54
3.6. Uji Normalitas .....	55
3.7. Uji Hipotesis .....	56

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Peneitian .....	59
4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut .....	59
4.1.2. Wilayah Kerja .....	60
4.1.3. Keadaan Ekonomi .....	61
4.1.4. Kondisi Geografi dan Peta Wilayah .....	61
4.1.5. Sektor usaha yang meninjol dan strategis .....	62
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	63
4.2.1. Deskripsi Variable Kesadaran Wajib Pajak (X1) .....	63

4.2.2.	Deskripsi Variable Kejujuran Wajib Pajak (X2) .....	64
4.2.3.	Deskripsi Variable Hasrat Membayar Pajak (X3) .....	65
4.2.4.	Deskripsi Variable Kedisiplinan Wajib Pajak (X4).....	66
4.2.5	Deskripsi Variable Penghindaran Pajak (Y) .....	67
4.3.	Uji Kualitas Data .....	68
4.3.1.	Uji Validitas .....	68
4.3.1.1.	Uji Validitas X <sub>1</sub> .....	68
4.3.1.2.	Uji Validitas X <sub>2</sub> .....	71
4.3.1.3.	Uji Validitas X <sub>3</sub> .....	71
4.3.1.4	Uji Validitas X <sub>4</sub> .....	73
4.3.1.5	Uji Validitas Y .....	74
4.3.2.	Uji Reliabilitas .....	76
4.4.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	76
4.4.1.	Analisis Asumsi Klasik .....	76
4.4.2.	Persamaan Regresi Linier Berganda .....	80
4.4.3.	Uji F .....	82
4.4.4.	Uji t .....	83
4.4.5.	Koefisien Beta .....	85
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
4.5.1.	Implikasi Penelitian .....	88
4.5.2.	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	88
4.5.3.	Keterbatasan Penelitian .....	89

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan .....	90
5.2. Saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Surabaya Rungkut)**

Oleh :

Tri Bangga Nirmala

Abstrak

Penerimaan dalam negeri sangatlah berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Sekarang pemerintah menerapkan self assessment system yaitu wajib pajak sebagai subyek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam rangka menghitung dengan jujur pajak terhutangnya dan menyetor serta melaporkannya tepat waktu. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak yang melekat pada diri Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 WP sebagai responden. Sedangkan sumber data di dapat dari jawaban responden atas kuisioner dan data-data WP dari KPP Pratama Surabaya Rungkut. Data yang diperoleh tersebut diolah atau dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda, yang menggunakan program SPSS. 16.0 for windows.

Dari hasil analisis telah dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah ditujukan peneliti, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak sebagian terbukti kebenarannya, karena hanya kesadaran wajib pajak dan kedisiplinan wajib pajak yang berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak dan sedangkan kejujuran wajib pajak dan hasrat membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

**Keyword :** Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Hasrat Membayar Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak, dan Penghindaran Pajak Penghasilan.

EFFECT OF APPLICATION OF SELF ASSESSMENT  
TAX AVOIDANCE SYSTEM OF INCOME TRENDS  
(Empirical Study taxpayer In KPP Pratama  
Surabaya Rungkut)

By:

Tri Bangsa Nirmala

Abstract

Domestic revenue is instrumental in the success of national development. Now the government to implement self assessment taxpayers as a system that is subject to tax in determining tax obligations entrusted to calculate, membayar, and report the total amount of tax payable, in accordance with the regulations that tax compliance is essential in order to calculate the tax payable honest and deposits as well as reporting on time. To prove the influence of awareness and meguji taxpayer, Taxpayer Honesty, Passion Paying Taxes and Tax Disciplinary inherent in taxpayer against Income Taxation Trends in the Village Taxpayers Wonorejo, District Rungkut, Surabaya.

The sample used in this study was 96 WP as respondents. While the source of the data obtained from respondents' answers on questionnaires and data from KPP Pratama WP Rungkut Surabaya. The data obtained were processed and analyzed using multiple linear regression, using SPSS program. 16.0 for windows.

From the analysis has concluded that the hypothesis has been devoted researchers, who claim that consciousness taxpayer, the taxpayer honesty, desire to pay taxes, and most taxpayers discipline truth, because there is only consciousness of taxpayers and taxpayer discipline that affects avoidance tendencies taxes and while the taxpayer honesty and desire to pay taxes does not affect the trend of tax evasion.

Keyword : Awareness Taxpayer, Taxpayer Honesty, Passion Paying Taxes,

Tax Disciplinary and Income Taxation.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini penerimaan dalam negeri didominasi oleh penerimaan sektor pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pendapatan dalam negeri dari sektor pajak dinilai lebih stabil dan dinamis dibandingkan dengan sektor non pajak lainnya.

Penerimaan dalam negeri sangatlah berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Sesuai dengan tekad menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara maka penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas yaitu sektor penerimaan pajak terus ditingkatkan.

Penerimaan pajak yang ditarik oleh pemerintah beragam jenisnya. Salah satunya yang dipungut dari masyarakat adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Jenis pajak ini merupakan salah satu primadona pendapatan negara karena Pajak Penghasilan (PPh) dianggap memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian, (Suryo dan Valentina,2006:3).

Disisi lain, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk

ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assesment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, (Direktorat Jendral Pajak,2010:3).

Komponen APBN tampak bahwa sumber pembiayaan APBN sejak Pelita I sampai dengan Pelita VII selama ini yang terbanyak berasal dari minyak dan gas bumi dan non migas yang sebagaimana besar berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak senantiasa diupayakan agar terus meningkat karena disektor inilah sumber penerimaan dalam negeri yang lebih stabil dan dinamis. Sejak pemerintah melakukan reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan, karena ini merupakan pewujudan dari tekad untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Sekarang pemerintah menerapkan self assesment system yaitu wajib pajak sebagai subyek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung,menbayar,dan melaporkan jumlah jumlah pajak yang terutang,sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam rangka menghitung dengan jujur pajak terhutangnya dan menyetor serta melaporkannya tepat waktu.



Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari official assessment system menjadi self assessment system. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kebijakan ini pada hakikatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain menyangkut masalah sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharap adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparat pajak, khususnya dalam rangka menjalankan self assessment system. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri (Indawati,2007:37).

Menurut Soemitro (1991:14) fungsi aparat pajak dapat dialihkan dan dikonsentrasikan pada tugas penyuluhan, pelayanan, pembinaan, dan pelaksanaan undang-undang perpajakan baru, dengan adanya self assessment system peranan aparatur dibatasi dan sebaliknya wajib pajak diharapkan lebih aktif karena telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan masuk ke kas negara melalui kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Self assessment system mengandung hal penting yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro,1991:14).

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh ditetapkannya self assessment system secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor

pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya ( Kusumawati dan Tarjo, 2006).

Sementara itu, fenomena yang terjadi sekarang, perkembangan jumlah WP semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari teori yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya yaitu kewajiban sebagai WP. Bahkan yang terjadi, sebagian dari mereka berusaha untuk menghindar dari pajak, baik itu perlakuan yang pasif sampai dengan perlakuan yang aktif. Dari teori tersebut nampak berbeda dengan yang terjadi di Kota Surabaya wilayah Rungkut dimana penulis menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian. Di Kota Surabaya wilayah Rungkut, jumlah WP yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti sampai dengan tahun 2008 hingga sampai dengan tahun 2012, jumlah

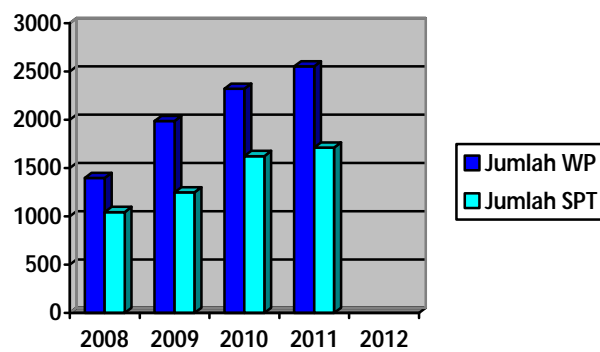
WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat, tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 1  
Perkembangan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribandi yang  
Menyampaikan SPT Tahunan

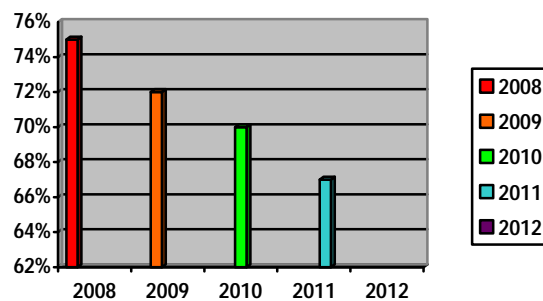
NO.	Tahun Pajak	Jumlah WP	Jumlah SPT yang disampaikan	Perkembangan %
1	2008	1398	1045	75%
2	2009	1986	1249	72%
3	2010	2321	1624	70%
4	2011	2554	1711	67%
5	2012	2619	-	-

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut

Grafik Jumlah SPT yang disampaikan



Grafik Perkembangan Persentasi



Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana jumlah wajib pajak tahun 2008 sebanyak 1398 orang dan pada tahun 2012 menjadi 2619 orang. Begitu juga jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun 2008 sampai tahun 2012 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk prosentase jumlah wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyetorkan SPT masa maupun SPT tahunan.

Hal ini dapat dimengerti karena dengan alasan bahwa hasil dari pembayaran pajak kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Sehingga menimbulkan suatu kecenderungan perilaku penghindaran pajak. Selain itu, dalam pelaksanaan self assessment system semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Beberapa latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN**

**( Study Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya  
Rungkut )”**. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Farida (2008) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan self assessment system Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah, sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran wajib pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan dan menguji Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak dan apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### a) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

b) Bagi Akademis

Referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh self assessment system pada kecenderungan penghindaran pajak penghasilan.

c) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk lebih mengetahui dan bisa menerapkan self assessment system dalam kewajiban membayarkan pajaknya agar tidak terjadi penghindaran pembayaran pajak.